

CASCADING KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

WALIKOTA

VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022

MISI KE-4 : Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran :
Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal

Indikator :
Maturitas SPIP

INSPEKTUR

Tujuan : 1.Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal

Indikator Tujuan : Level Maturitas SPIP (Skala 1 - 5)

Sasaran Strategis :
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut
3. Meningkatkan Maturitas SPIP Perangkat Daerah
4. Meningkatkan Level Kapabilitas APIP

Indikator Sasaran :
1. Persentase Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP B
2. Persentase Tingkat Penyelesaian TLHP BPK, dan APIP
3. Persentase Jumlah Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP level 3
4. Level Kapabilitas APIP (Skala 1-5)

SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH

Program :

- Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
- Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Sasaran Program :

- Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah dalam penyelesaian TLHP
- Meningkatkan kompetensi aparatur pengawas

Indikator Kinerja Program :

- Persentase PD yang melaksanakan tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
- Persentase Pemenuhan Kompetensi Auditor setiap tahunnya

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

Program :

- Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
- Penegakan Integritas
- Pengawasan Reformasi Birokrasi

Sasaran Program :

- a. Meningkatkan Pengawasan internal
b. Meningkatkan Kegiatan Evaluasi SAKIP PD
c. Meningkatkan Kegiatan Evaluasi SPIP PD
- Meningkatnya Evaluasi PMPRB pada Perangkat Daerah
- Meningkatnya Integritas ASN melalui Penilaian Zona Integritas

Indikator Kinerja Program :

- a. Persentase Auditi yang dilakukan Pengawasan
b. Persentase PD yang dievaluasi LAKIP

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

Program :

- Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
- Penegakan Integritas
- Pengawasan Reformasi Birokrasi

Sasaran Program :

- a. Meningkatkan Pengawasan internal
b. Meningkatkan Kegiatan Evaluasi SAKIP PD
c. Meningkatkan Kegiatan Evaluasi SPIP PD
- Meningkatnya Evaluasi PMPRB pada Perangkat Daerah
- Meningkatnya Integritas ASN melalui Penilaian Zona Integritas

Indikator Kinerja Program :

- a. Persentase Auditi yang dilakukan Pengawasan
b. Persentase PD yang dievaluasi LAKIP

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Program :

- Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
- Penegakan Integritas
- Pengawasan Reformasi Birokrasi

Sasaran Program :

- a. Meningkatkan Pengawasan internal
b. Meningkatkan Kegiatan Evaluasi SAKIP PD
c. Meningkatkan Kegiatan Evaluasi SPIP PD
- Meningkatnya Evaluasi PMPRB pada Perangkat Daerah
- Meningkatnya Integritas ASN melalui Penilaian Zona Integritas

Indikator Kinerja Program :

- a. Persentase Auditi yang dilakukan Pengawasan
b. Persentase PD yang dievaluasi LAKIP

5. Jumlah LHR LKPD
6. Jumlah Laporan Monitoring DAK
7. Jumlah Laporan Hasil Reviu Anggaran dan PBJ
8. Jumlah LHR LAKIP
9. Jumlah LHE AKIP PD
10. Jumlah PD yang dievaluasi SPIP
11. Jumlah LHP khusus
12. Jumlah Laporan Monev Laporan gratifikasi
13. Jumlah Laporan Penilaian Zona Integritas
14. Jumlah LHP Kasus Pengaduan

5. Jumlah LHR LKPD
6. Jumlah Laporan Monitoring DAK
7. Jumlah Laporan Hasil Reviu Anggaran dan PBJ
8. Jumlah LHR LAKIP
9. Jumlah LHE AKIP PD
10. Jumlah PD yang dievaluasi SPIP
11. Jumlah LHP khusus
12. Jumlah Laporan Monev Laporan gratifikasi
13. Jumlah Laporan Penilaian Zona Integritas
14. Jumlah LHP Kasus Pengaduan

5. Jumlah LHR LKPD
6. Jumlah Laporan Monitoring DAK
7. Jumlah Laporan Hasil Reviu Anggaran dan PBJ
8. Jumlah LHR LAKIP
9. Jumlah LHE AKIP PD
10. Jumlah PD yang dievaluasi SPIP
11. Jumlah LHP khusus
12. Jumlah Laporan Monev Laporan gratifikasi
13. Jumlah Laporan Penilaian Zona Integritas
14. Jumlah LHP Kasus Pengaduan